

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekeraan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah-wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks seperti Provinsi Papua Barat Daya. Data dari Komnas Perempuan dan laporan tahunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Barat Daya mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bentuk kekerasan yang dialami sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga kekerasan berbasis ekonomi dan sosial. Tantangan geografis yang dihadapi oleh wilayah ini, seperti keterpencilan, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik, seringkali memperburuk kondisi para korban, membuat mereka kesulitan untuk melaporkan atau mencari bantuan dari pihak berwenang.

Secara sosiokultural, budaya patriarki yang masih kuat di Papua Barat Daya seringkali menghambat perempuan dan anak dalam mendapatkan perlindungan yang memadai. Perempuan dan anak cenderung dianggap sebagai kelompok rentan yang kurang memiliki hak untuk berbicara atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan mendorong terjadinya sikap permisif terhadap kekerasan di lingkungan sosial. Dalam konteks seperti ini, partisipasi warga menjadi elemen penting dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, tingkat partisipasi warga dalam menangani masalah ini masih terbilang rendah, disebabkan oleh minimnya pengetahuan, keterbatasan akses terhadap informasi, serta lemahnya koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Secara khusus, Kota Sorong sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua Barat Daya juga menghadapi persoalan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan sangat penting, namun penelitian yang membahas keterlibatan masyarakat dalam konteks ini masih terbatas. Data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan adanya peningkatan kasus pada tahun 2023–2024, dengan 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 84 kasus terhadap anak. Angka ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dan menegaskan perlunya perhatian lebih terhadap isu ini.

Selain data provinsi, catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Sorong menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 91 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Program penurunan kekerasan telah dilaksanakan sejak 2021 melalui berbagai upaya seperti sosialisasi,



pendampingan korban, mediasi, dan penguatan kapasitas lembaga. Namun, tingginya angka kasus menunjukkan bahwa program ini belum berjalan optimal, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat yang lebih kuat dan koordinasi antar lembaga. Untuk mendukung analisis, data tahunan 2021–2024 dan capaian program akan dilengkapi dalam bagian hasil penelitian.

Penyajian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang mencapai 113 kasus untuk perempuan dan 84 kasus untuk anak, serta data Kota Sorong yang mencatat 91 kasus pada tahun 2023, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan persoalan serius baik secara regional maupun lokal, memperlihatkan bahwa satu kota saja telah menyumbang angka signifikan meskipun program penurunan kekerasan telah berjalan sejak 2021, sehingga menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas program dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Partisipasi warga merupakan pilar penting dalam pembangunan sosial dan tata kelola publik yang inklusif. Secara teoretis, partisipasi tidak hanya berarti hadir dalam forum atau mengikuti prosedur formal, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan dan perumusan solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, berbagai teori partisipasi telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Teori-teori ini saling melengkapi dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika partisipasi publik. Salah satu teori yang banyak dijadikan rujukan adalah Teori Kualitas Kekuasaan, yang berfokus pada distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Model klasik yang diusulkan oleh Sherry Arnstein melalui Ladder of Citizen Participation menggambarkan delapan tingkat partisipasi, dari manipulasi hingga kendali penuh oleh warga. Teori ini menekankan bahwa partisipasi harus memberikan kekuatan substantif kepada masyarakat, bukan sekadar simbolik.

Selain itu, kategori Teori Proses dan Interaksi menyoroti pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Proses kolaboratif yang baik dapat menciptakan dialog yang inklusif, memungkinkan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, Teori Implementasi Layanan memandang partisipasi sebagai kemitraan dalam penyediaan layanan publik, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya akan kualitas layanan, tetapi juga memberdayakan masyarakat mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan sosial mereka. Teori Konteks Sosial menekankan faktor-faktor budaya, jejaring dan modal sosial yang mempengaruhi partisipasi. Modal sosial yang ada dalam suatu komunitas dapat menciptakan ikatan yang lebih baik antar warga dan lembaga, sehingga meningkatkan efektivitas program-



program yang dilaksanakan. Sementara itu, Teori Kepentingan berfokus pada pemetaan aktor dan kepentingan mereka dalam suatu kebijakan atau program, membantu pengambil kebijakan untuk merancang strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori Cogan dan Carlson digunakan sebagai alat ukur dan kerangka analisis untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Teori ini menawarkan indikator yang mencakup kinerja, pengalaman subjektif, dan hubungan interpersonal, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partisipasi terjadi dan dampaknya terhadap hasil kebijakan.

Meskipun terdapat banyak potensi dalam partisipasi, tantangan seperti struktur pengambilan keputusan yang tidak jelas, dukungan kelembagaan yang memadai, dan ketidakpercayaan terhadap institusi formal dapat menghambat efektivitas partisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan dampaknya terhadap program penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Barat Daya.

Penelitian ini berfokus pada satu pertanyaan utama: **Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong, dilihat dari tiga indikator menurut Cogan dan Carlson—Kinerja, Pengalaman Subjektif, dan Hubungan Interpersonal—serta faktor-faktor yang mempengaruhinya?**

1.2 Tinjauan Teori

Partisipasi warga merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial dan tata kelola publik yang inklusif. Secara teoretis, partisipasi tidak hanya sekadar hadir dalam forum atau mengikuti prosedur formal, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan dan perumusan solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, berbagai teori partisipasi telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan program. Teori-teori tersebut saling melengkapi dan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika partisipasi publik.

Kategori Teori Partisipasi

Teori-teori partisipasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang saling melengkapi:

1. Teori Kualitas Kekuasaan



Tangga Partisipasi



Diadaptasi dari Teori Partisipasi Warga Arnstein (1969)

Teori ini berfokus pada distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Model klasik yang sering dijadikan rujukan adalah **Ladder of Citizen Participation** dari Sherry Arnstein (1969), yang menggambarkan partisipasi sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkat, mulai dari manipulasi hingga kendali penuh oleh warga. Arnstein mengklasifikasikan delapan tingkat partisipasi ke dalam tiga kelompok besar: Non-participation (Manipulation, Therapy), Tokenism (Informing, Consultation, Placation), dan Citizen Power (Partnership, Delegated Power, Citizen Control). Inti dari teori ini adalah redistribusi kekuasaan; semakin tinggi posisi pada tangga, semakin besar kendali warga terhadap

proses dan hasil kebijakan. Dalam konteks program penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerangka Arnstein memandu penilaian sejauh mana keterlibatan masyarakat melampaui konsultasi simbolik menuju kemitraan yang setara dan, pada akhirnya, kendali warga atas keputusan yang menyangkut keselamatan dan perlindungan mereka.

Selain Arnstein, teori **Public Participation Spectrum** dari IAP2 (International Association for Public Participation) menyediakan panduan operasional yang lebih praktis untuk merancang tingkat dan janji partisipasi. Model ini mencakup lima tingkat partisipasi: Inform, Consult, Involve, Collaborate, dan Empower. Setiap tingkat menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda dan tujuan akhir dari proses partisipasi, yaitu memberdayakan warga dalam pengambilan keputusan. **Participatory Governance** oleh Fung & Wright juga menekankan pentingnya pengukuran sejauh mana warga memiliki ali nyata terhadap kebijakan. Pendekatan ini penting untuk mengukur apakah partisipasi bersifat tokenistik atau benar-benar berdayakan masyarakat.



2. Teori Proses dan Interaksi

Kategori ini menyoroti dinamika komunikasi, kolaborasi, dan deliberasi dalam partisipasi. **Collaborative Governance** (Ansell & Gash, 2008) menekankan proses kolaboratif lintas aktor—pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO/LSM), dan komunitas—yang dibangun atas kepercayaan, dialog tatap muka, aturan main yang jelas, dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil bersama. Konsep ini relevan untuk jejaring layanan penanganan kekerasan, seperti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), UPTD PPPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kepolisian, dan layanan kesehatan. Melalui kolaborasi ini, berbagai aktor dapat saling mendukung dan memperkuat kapasitas satu sama lain dalam menangani isu-isu kompleks.

Deliberative Democracy (Habermas & Dryzek) juga menjadi bagian penting dalam kategori ini, menekankan kualitas dialog publik dan mekanisme diskusi rasional yang inklusif. Pendekatan ini sangat relevan untuk isu-isu kompleks yang memerlukan konsensus dan kerja sama lintas sektor. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, proses deliberatif dapat membantu menciptakan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan, terutama perempuan dan anak, untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Teori Implementasi Layanan

Teori ini memandang partisipasi sebagai kemitraan dalam penyediaan layanan publik. **Co-Production Theory** (Ostrom) menekankan bahwa pelayanan publik yang efektif adalah hasil produksi bersama antara penyedia layanan dan pengguna/komunitas. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, co-production tampak pada pelaporan kasus oleh warga, pendampingan komunitas, penyediaan rumah aman, hingga pemulihan berbasis komunitas. Teori ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap penyediaan layanan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan sosial mereka.

4. Teori Konteks Sosial

Kategori ini menekankan faktor-faktor budaya, jejaring sosial, dan modal sosial yang mempengaruhi partisipasi. **Social Capital Theory** (Putnam) menjelaskan bagaimana kepercayaan dan jaringan sosial dapat memperkuat partisipasi. Modal sosial yang kuat dalam suatu komunitas menciptakan ikatan yang lebih baik antara warga dan lembaga, yang meningkatkan efektivitas program-program yang



dilaksanakan. Sementara itu, teori kelembagaan melihat bagaimana norma dan aturan mempengaruhi keterlibatan warga. Keterbatasan akses informasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi formal sering kali menjadi penghalang yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi, terutama di daerah dengan struktur sosial yang kompleks.

5. Teori Kepentingan

Teori ini berfokus pada pemetaan aktor dan kepentingan mereka dalam suatu kebijakan atau program. **Stakeholder Theory** (Freeman) dan pendekatan **Public Choice** membantu mengidentifikasi siapa yang terlibat, apa kepentingannya, dan bagaimana interaksi antaraktor mempengaruhi hasil kebijakan. Dengan memahami kepentingan masing-masing aktor, pengambil kebijakan dapat merancang strategi partisipasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan Evaluatif oleh Cogan dan Carlson

Dalam kerangka ini, teori Cogan dan Carlson (2017) dapat ditempatkan sebagai bagian dari teori kualitas partisipasi yang bersifat evaluatif dan operasional. Berbeda dengan Arnstein yang normatif, Cogan dan Carlson menawarkan indikator konkret untuk menilai kualitas partisipasi melalui tiga dimensi: kinerja, pengalaman subjektif, dan hubungan interpersonal.

- **Kinerja** mengukur sejauh mana masyarakat benar-benar terlibat dalam kegiatan, bukan sekadar hadir secara simbolis. Ini mencakup tindakan nyata yang dapat diamati, seperti mengikuti sosialisasi, mendampingi korban, atau melaporkan kasus.
- **Pengalaman subjektif** menilai makna partisipasi bagi warga, apakah memberikan kepuasan dan manfaat sosial. Pengalaman ini sering kali tersembunyi, tetapi dapat terlihat melalui ekspresi atau respons emosional individu terhadap proses partisipasi.
- **Hubungan interpersonal** mengacu pada kualitas interaksi sosial yang terbentuk melalui partisipasi, termasuk kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Hubungan ini penting karena partisipasi selalu bersifat sosial dan didefinisikan secara budaya, yang berarti bahwa interaksi sosial yang baik dapat meningkatkan kualitas partisipasi itu sendiri.



an dalam Partisipasi

demikian, literatur kritis mengingatkan bahwa tanpa struktur bilan keputusan yang jelas, dukungan kelembagaan yang

memadai, dan sensitivitas terhadap norma budaya serta relasi kuasa, partisipasi mudah tergelincir menjadi tokenisme—sekadar hadir dan didengar, tetapi tanpa pengaruh substantif terhadap kebijakan. Tantangan ini lebih nyata dalam konteks Papua Barat Daya, di mana akses informasi terbatas, ketidakpercayaan terhadap institusi formal, dan kuatnya patriarki menghambat kehadiran suara perempuan dan anak dalam ruang formal maupun informal.

1.3 Gambaran Umum Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong

Sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong memikul tanggung jawab besar dalam mengatasi persoalan kekerasan berbasis gender yang semakin mengkhawatirkan. Data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya mencatat peningkatan kasus pada tahun 2023–2024, yaitu 113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 84 kasus terhadap anak. Di tingkat lokal, DP3A Kota Sorong melaporkan 91 kasus pada tahun 2023, mencakup kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun program penurunan kekerasan telah berjalan sejak 2021, tantangan implementasi masih besar. Pemerintah Kota Sorong melalui DP3A dan UPTD PPPA merancang program dengan tiga pilar utama: **pengurangan angka kekerasan**, **peningkatan kesadaran masyarakat**, dan **penguatan kapasitas lembaga**.

1.3.1 Mengurangi Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Upaya pengurangan angka kekerasan dilakukan melalui pendekatan strategis yang menekankan penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah penyediaan layanan mediasi bagi korban, pelaku, dan keluarga. Mediasi ini bukan sekadar proses formal, tetapi dirancang untuk menciptakan ruang dialog yang aman, sehingga korban dapat menyampaikan pengalaman tanpa tekanan, dan pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak perilakunya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip **restorative justice**, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan pencegahan kekerasan berulang.

Selain mediasi, pemerintah juga mengintegrasikan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses, termasuk melalui hotline dan posko pengaduan di tingkat kelurahan. Namun, tantangan muncul ketika masyarakat masih enggan melapor karena stigma sosial dan rasa takut terhadap balas dendam pelaku. Oleh karena itu, DP3A berupaya membangun jejaring dengan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk menciptakan jaminan keamanan bagi pelapor. Strategi ini menunjukkan bahwa pengurangan angka kekerasan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga



pada keberhasilan membangun kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan.

1.3.2 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Kesadaran masyarakat merupakan fondasi penting dalam pencegahan kekerasan. DP3A Kota Sorong melaksanakan sosialisasi masif melalui berbagai kanal, mulai dari pertemuan komunitas, sekolah, hingga media sosial. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan dan mekanisme pelaporan, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kekerasan. Pendekatan edukasi berbasis komunitas ini dirancang agar pesan yang disampaikan lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Pemerintah juga melibatkan pemuda dari komunitas keagamaan sebagai **agen perubahan**. Mereka berperan menyebarkan informasi dan membangun diskusi di lingkup komunitas masing-masing. Strategi ini mencerminkan penerapan teori **community-based participatory governance**, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam penyebaran nilai-nilai perlindungan. Namun, efektivitas sosialisasi masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jangkauan di daerah pinggiran dan resistensi budaya patriarki yang menganggap kekerasan sebagai masalah privat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode sosialisasi, misalnya melalui pendekatan seni budaya atau forum interaktif yang melibatkan tokoh adat dan agama.

1.3.3 Meningkatkan Kapasitas Lembaga dan Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan

Penguatan kapasitas lembaga menjadi pilar ketiga dalam program ini. Pemerintah Kota Sorong menyediakan layanan komprehensif, seperti rumah aman untuk korban, konseling psikologis, pendampingan hukum, dan fasilitas medis. Layanan ini bertujuan memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan akses ke proses hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan, seperti minimnya tenaga profesional yang terlatih in lemahnya koordinasi antar lembaga. Fragmentasi kelembagaan menyebabkan proses penanganan kasus berjalan lambat dan tidak terintegrasi.

Untuk mengatasi hal ini, DP3A terus melakukan advokasi in pengawasan, serta mendorong pelatihan bagi aparat dan lawan agar lebih sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

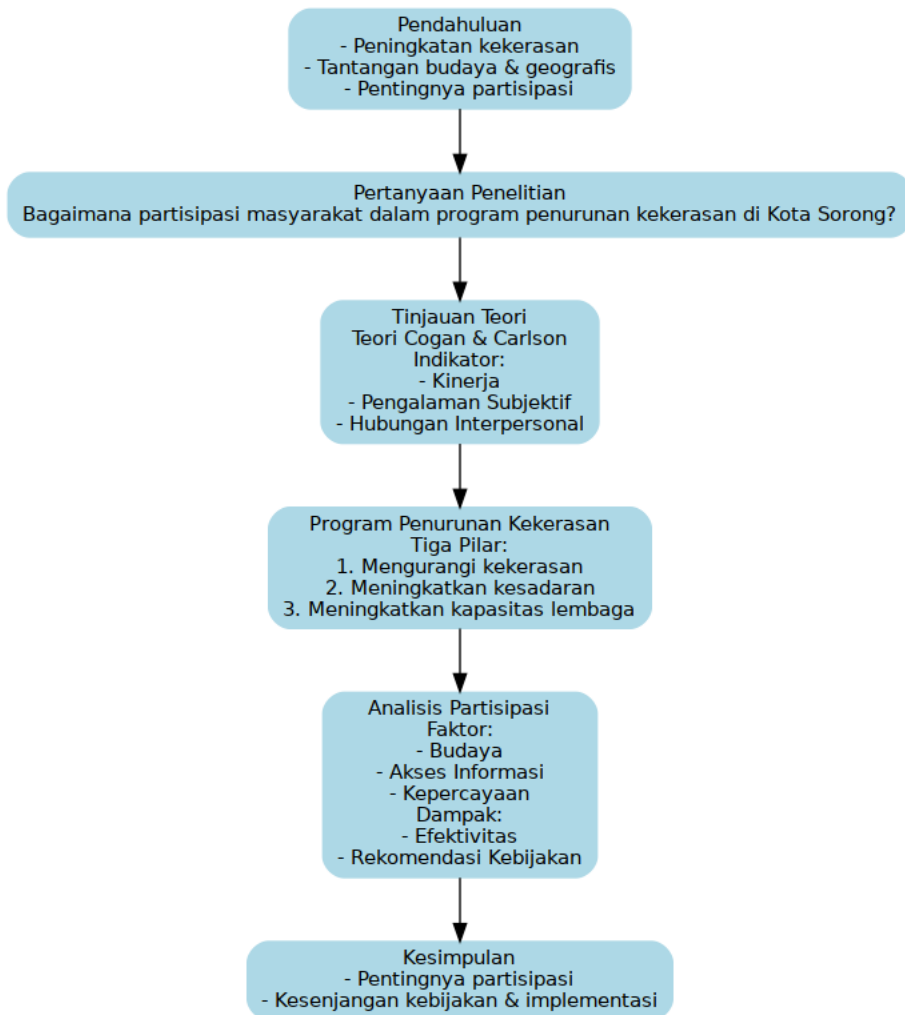


Pemerintah juga berupaya membangun sistem pelaporan terpadu yang memungkinkan data kasus diakses oleh semua pihak terkait, sehingga respons dapat lebih cepat dan terkoordinasi. Upaya ini mencerminkan kebutuhan akan struktur tata kelola yang jelas dan kolaboratif, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan.

Meskipun program penurunan kekerasan telah berjalan sejak 2021, tingginya angka kasus menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis **partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci** yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Partisipasi yang lebih kuat, didukung oleh koordinasi antar lembaga dan inovasi dalam pendekatan sosialisasi, diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kekerasan. Data tahunan 2021–2024 dan capaian program akan disajikan lebih lanjut pada bagian hasil penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



1.4 Rumusan Masalah

Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa masalah yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimana kinerja partisipasi masyarakat dalam Program Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong?
Bagaimana pengalaman subjektif masyarakat terhadap keterlibatan mereka dalam program tersebut?
Bagaimana hubungan interpersonal yang terbentuk antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait melalui program ini?



4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program ini?
5. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat terhadap efektivitas program penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat diukur melalui tiga indikator menurut Cogan dan Carlson, yaitu kinerja, pengalaman subjektif, dan hubungan interpersonal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, menganalisis dampaknya terhadap efektivitas program, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. **Secara akademis**, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai partisipasi publik dan tata kelola berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan penelitian lanjutan yang relevan dengan isu partisipasi masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas program penurunan kekerasan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam program perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi peneliti untuk mengaktualisasikan ilmu yang diperoleh dan menerapkannya dalam konteks nyata.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kualitatif deskriptif**. Menurut John W. Creswell (2019) dalam bukunya *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas interaksi sosial dan dinamika partisipasi publik dalam konteks Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong.

Metode penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada **filsafat postpositivisme**, yang menekankan pentingnya memahami fenomena dalam konteksnya yang alami, berlawanan dengan pendekatan eksperimen yang lebih terkontrol. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi ini mencakup kombinasi berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai partisipasi publik.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat **induktif** dan kualitatif, yang berarti bahwa peneliti akan mengolah data yang diperoleh untuk menemukan pola, tema, dan makna yang muncul dari informasi yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggambaran makna dan konteks daripada generalisasi statistik, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan masyarakat mengenai program yang diteliti.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, dan menjelaskan secara rinci permasalahan yang ada. Fokus utama penelitian adalah untuk mempelajari partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang objektif dan relevan, yang pada gilirannya akan membantu dalam menganalisis dan memahami dinamika partisipasi masyarakat serta implikasinya terhadap keberhasilan program tersebut.

2.2 Prosedur

2.2.1 Informan Penelitian



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Sorong

Yulinda Mosso, SE

Sebagai pemimpin institusi yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan perempuan, beliau memiliki wawasan strategis dan bijakan terkait pelaksanaan program.

2. Kepala Bidang yang membawahi Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Informan ini akan memberikan informasi teknis dan operasional mengenai implementasi program serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

3. Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan

Staf yang terlibat dalam pelaksanaan program ini akan memberikan perspektif dari sudut pandang operasional dan pengalaman langsung dalam interaksi dengan masyarakat.

4. Perwakilan Komunitas Lokal

Anggota komunitas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak. Mereka dapat memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dan dampak program di tingkat lokal.

5. Masyarakat Umum

Masyarakat yang menjadi sasaran program, termasuk perempuan dan anak yang berpotensi menjadi korban kekerasan. Perspektif mereka sangat penting untuk memahami bagaimana program ini dirasakan dan diakses oleh kelompok yang dituju.

Dengan melibatkan berbagai informan dari latar belakang yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi partisipatif, yang semuanya bertujuan untuk menggali informasi yang kaya dan beragam dari setiap informan.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang krusial untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi:

2.3.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai gejala-gejala atau fenomena tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Anggara (2015). Dalam konteks penelitian ini, observasi akan dilakukan terhadap Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan data pendukung terkait partisipasi publik dalam program tersebut.

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan interaksi masyarakat dalam program, serta mencatat



hasil observasi secara singkat. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami dinamika yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi publik.

2.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan terarah antara pewawancara dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur (in-depth interview), yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi. Pewawancara akan menyiapkan kerangka pertanyaan yang mencakup pokok-pokok penting, namun tidak harus mengikuti urutan yang kaku.

Wawancara akan dilakukan dengan informan terkait partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang konkret dan mendalam. Peneliti akan menggunakan panduan wawancara (interview guide) dan mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan informan, sehingga proses wawancara menjadi interaktif dan dinamis. Sebelum wawancara dimulai, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian kepada informan. Seluruh sesi wawancara akan direkam untuk memastikan akurasi data dan menghindari distorsi informasi.

2.3.3 Telaah Dokumen

Telaah dokumen, menurut Pohan (2007), adalah metode pengumpulan informasi yang berasal dari dokumen tertulis, seperti arsip, akta, ijazah, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, dan catatan biografi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan telaah dokumen untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Metode ini akan digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap data yang diperoleh dari informan.

Dengan menerapkan ketiga teknik pengumpulan data ini—observasi, wawancara, dan telaah dokumen—penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam, serta memberikan wawasan yang lebih baik mengenai partisipasi publik dalam program yang diteliti.



2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam proses penelitian bertujuan untuk mengolah dan memanfaatkan data yang telah terkumpul, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat. Menurut Miles & Mendenhall (2018), teknik analisis data terdiri dari beberapa langkah yang berkaitan, sebagai berikut:

2.4.1 Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Selain itu, dokumentasi tambahan juga akan dikumpulkan untuk memperkaya informasi yang ada. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian.

2.4.2 Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penting dalam analisis yang mencakup pemilihan dan penyederhanaan dari data mentah. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara merangkum informasi, memilih poin-poin penting, memfokuskan isu-isu yang relevan, serta mencari tema dan pola yang muncul dari data yang diperoleh. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi terkait partisipasi publik dalam program tersebut, sehingga data yang tersisa dapat lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

2.4.3 Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah langkah di mana data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian ini juga dapat meliputi diagram, bagan, tabel, dan matriks yang relevan. Penyajian data yang baik akan membantu menjawab permasalahan penelitian dan memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan serta pengambilan keputusan terkait partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Dengan cara ini, data yang disajikan dapat diakses dan dipahami dengan lebih mudah oleh berbagai pemangku kepentingan.

2.4.4 Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)

Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan melalui interpretasi dan penjelasan yang mendalam untuk menemukan makna dari data yang telah diolah. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan temuan penelitian. Kesimpulan ini akan digunakan sebagai jawaban atas persoalan yang diteliti, khususnya terkait partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan program yang bersangkutan.



2.5 Validitas dan Reliabilitas Data

2.5.1 Validitas

Validitas merupakan proses yang penting untuk memastikan akurasi hasil penelitian dengan mengikuti prosedur tertentu, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2019). Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan uji triangulasi sebagai metode untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi melibatkan perbandingan atau pencocokan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau kriteria eksternal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan.

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik sumber data. Dalam metode ini, data yang telah dikumpulkan akan diperiksa kembali bersama informan untuk memastikan kebenarannya. Proses ini tidak hanya melibatkan wawancara, tetapi juga studi literatur yang relevan. Peneliti memanfaatkan triangulasi sebagai uji validitas untuk data yang diperoleh dari beberapa sumber, termasuk:

1. **Studi Literatur:** Mengkaji teori kebijakan berbasis bukti dan implementasi kebijakan yang relevan.
2. **Hasil Observasi:** Mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan.
3. **Wawancara Mendalam:** Menggali informasi dari informan secara lebih detail.

Dari ketiga sumber tersebut, hasilnya kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan akurat.

2.5.2 Reliabilitas Data

Reliabilitas data dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat konsistensi dan stabilitas data yang diperoleh. Data dianggap reliabel jika tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil-hasil yang diperoleh, serta dipaparkan secara jelas, terperinci, sistematis, dan dapat dipercaya (Creswell, 2019). Dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber memiliki kesamaan dan konsistensi, peneliti dapat memberikan jaminan bahwa hasil penelitian ini dapat diandalkan.

Dengan menerapkan metode triangulasi dan menjaga reliabilitas data, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman partisipasi publik dalam Program Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Sorong, serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

